

DAFTAR PUSTAKA

Anjarsari, Lulu. 2020. "Menyoal Konstitusionalitas Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi" dalam *Ketika Konstitusionalitas Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi Dipertanyakan, Majalah Konstitusi Nomor 160* (hlm 14-17). Jakarta: Majalah Konstitusi.

Argawati, Utami. 2022 "Permohonan Uji Formil Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Ditolak", <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18293>, (diakses pada 21 Juli 2022 pukul 20.30 WIB).

Arifin Mochtar, Zainal, 2019, "5 Lima Konsep Problem Penegakan Hukum" (materi disampaikan dalam diskusi PUKAT FH UGM, 9 Desember 2019)

Aryanto, Bayu, dkk. 2021. "Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional" dalam *Menggagas Mekanisme Fast Track Legislation Dalam Sistem Pembentukan Undang-Undang di Indonesia Volume 10 Nomor 2* (hlm 190-200). Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional. DOI:<http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v10i2.703>

Ash Shofa, Burhan. 2007. *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Kelima. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Astuti, Indriyani. 2020. "Undang-Undang Corona Dinilai Cacat Formil", <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/337630/uu-korona-dinilai-cacat-formil>, (diakses pada 21 Juli 2022 pukul 20:00 WIB).

Chilcot, Sir John. 2009. "Fast Track Legislation: Constitutional Implications and Safeguards" dalam *Memorandum by the Better Government Initiative Volume II: Evidence HL Paper 116-II* (hlm 1-5). United Kingdom: House of Lords Select Committee on the Constitutions.

Davis, M. Christopher, 2015, "Expedited Procedures in the House: Variations Enacted into Law" (hlm. 2), New York: Congressional Research Service, Library of Congress.

Edytia Puji Febrianti, Ika, 2023, “*Analisis Yuridis Konsep Fast Track Legislation Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2011*”, UIN K.H Achmad Siddiq Jember.

Fadli, Muhammad. 2018. “Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan” dalam *Pembentukan Undang-Undang yang Mengikuti Perkembangan Masyarakat Volume 15 Nomor 1* (hlm 49–58). Sulawesi Selatan: Kantor Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Huda, Ni'matul. 2007. *Hukum Tata Negara Indonesia Edisi 1*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Hongju Koh, Harold, 1992, “*The Fast Track and United States Trade Policy*” Vol: XVIII:1, (hlm. 148), Brooklyn Journal International Law.

Irham Roihan, Muhammad, 2021, “*“Omnibus Law Ditinjau Dari Perspektif Sistem Perundang-Undangan, (studi kasus undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja)*”, Universitas Islam Indonesia.

Irman Putra, Andi, 2008 “*Peran Program Legislasi Nasional Dalam Perencanaan Pembentukan Hukum Nasional Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*”, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia.

Kansil, C.S.T. 1983. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima. Jakarta: PN Balai Pustaka.

Kus Pratiwi, Dian, dkk, 2022, “*POTENSI PENGATURAN DAN PRAKTEK PEMBENTUKAN UNDANGUNDANG SECARA CEPAT DI INDONESIA (Studi terhadap Pembentukan Revisi Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi)*”, Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 19 No.4,

Kus Pratiwi, Dian, 2021 “*Prosiding Webinar Berseri: Perkembangan Hukum Tata Negara di Masa Pandemi*”, FH UII PRESS.

Mahmud Marzuki, Peter. 2005. *Penelitian Hukum*, Cetakan Kelima. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Manan, Bagir. 2005. *Aspek – Aspek Pengubah Hukum*, Cetakan Kesatu. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Manan, Bagir dan Dwi Harjanti, Susi, 2017, “*Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Dalam Perspektif Ajaran Konstitusi dan Prinsip Negara Hukum*”, Pendidikan Jurnal Ilmu Hukum Vol. 4 No. 2. DOI: <https://doi.org/10.22304/pjih.v4n2.a1>

McLeay, Elizabeth, Geiringer, Claudia, Higbee, Polly, 2012 “*Urgent Legislation in the New Zealand House of Representatives and the Bypassing of Select Committee Scrutiny*” Vol 8, Issues 2, (hlm. 13) New Zealand: Policy Quarterly.

Samosir, Daniel, 2015, “*Faktor-Faktor yang Menyebabkan Materi Muatan Undang-Undang Bertentangan Dengan UUD 1945*”, Jurnal Konstitusi, Vol 12, No 4. DOI:<https://doi.org/10.31078/jk1246>

Setiadi, Wicipto. 2012. “Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional” dalam *Pembangunan Hukum Dalam Rangka Peningkatan Supremasi Hukum Volume 1 Nomor 1* (hlm 2). Jakarta: Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. DOI:<http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v1i1.103>

Setiadi, Wicipto, “*Fast Track Legislation Sebagai Bentuk Peningkatan Supremasi Hukum*” (materi disampaikan dalam diskusi terbuka FH Unpad, 17 Desember 2020), hlm.12.

Sina Chandranegara, Ibnu. 2021. “Jurnal Penelitian Hukum De Jure” dalam *Pengadopsian Mekanisme Fast Track Legislation Dalam Pengusulan Rancangan Undang-Undang Oleh Presiden Volume 21 Nomor 1* (hlm 124–126). Jakarta: Jurnal Penelitian Hukum De Jure. DOI:<http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2021.V21.123-140>

Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi, Perkara Nomor: 59/PUU-XVIII/2020, Perihal Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi, Perkara Nomor: 91/PUU-XVIII/2020, Perihal Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.